

**MODEL CIVIC ACTION PEMUDA UNTUK MEMBERDAYAKAN DISABILITAS BERBASIS
CITIZENSHIP EDUCATION**
*YOUTH CIVIC ACTION MODEL TO EMPOWER PERSONS WITH DISABILITIES BASED ON
CITIZENSHIP EDUCATION*

Epin Saepudin*

Institut Teknologi Bandung
Jalan Ganesha Nomor 10 Bandung 40132, Indonesia

Agil Nanggala

Universitas Pendidikan Indonesia
Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima : 25 Maret 2025
Disetujui : 29 Juni 2025

Keywords:

persons with disabilities; civic education; discrimination

Kata Kunci:

penyandang disabilitas; pendidikan kewarganegaraan; diskriminasi

***) Korespondensi:**

E-mail: epinsaepudin@itb.ac.id

Abstract : The purpose of this study is to analyze the role of youth civic action in overcoming the charity model of disability and the medical or individual model of disability, as well as the model of youth civic action in empowering persons with disabilities. This study used a qualitative descriptive method with observation, interviews, and document study techniques. The results show that youth civic action plays an important role in overcoming the stigma of the charity model of disability and the medical or individual model of disability. Youth civic action is guided by the principles of the social model of disability, which views persons with disabilities as capable of empowerment when supported by inclusive factors. Youth civic action models to empower people with disabilities can be implemented in three ways, by joining formal organizations, volunteering with community groups that support people with disabilities, and participating in collective incidental activities.

Abstrak: Tujuan kajian ini yaitu untuk menganalisis peran *civic action* pemuda dalam mengatasi *charity model of disability* dan *medical or individual model of disability* serta model *civic action* pemuda dalam pemberdayaan penyandang disabilitas. Kajian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumen. Hasil kajian menunjukkan bahwa *civic action* pemuda berperan penting dalam mengatasi stigma *charity model of disability* dan *medical or individual model of disability*. *Civic action* pemuda berpedoman pada prinsip *social model of disability* yang memandang bahwa penyandang disabilitas mampu berdaya apabila didukung dengan faktor-faktor yang bersifat inklusif. Model *civic action* pemuda untuk memberdayakan penyandang disabilitas dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu dengan terlibat dalam organisasi formal, menjadi relawan komunitas peduli difabel, serta kegiatan insidental yang bersifat kolektif.

PENDAHULUAN

Stigma ableisme cenderung menimbulkan diskriminasi sosial pada penyandang disabilitas. Ableisme beranggapan bahwa penyandang disabilitas merupakan individu yang tidak normal, aib keluarga, cacat secara sosial, serta beban sosial yang dapat memperlambat suatu pekerjaan. Stigma ableisme menyebabkan

penyandang disabilitas merasa tidak percaya diri untuk meningkatkan kompetensi sekaligus mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan orang lain. Diskriminasi yang ditujukan kepada penyandang disabilitas tentu tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial inklusif berdasarkan Pancasila. Ableisme yang berkembang di masyarakat menimbulkan tekanan psikologis

bagi penyandang disabilitas sehingga berdampak pada produktivitas yang kurang optimal (Yusainy, Thohari, & Gustomy, 2016). Diskriminasi terhadap penyandang disabilitas kebanyakan hanya ditelaah berdasarkan perspektif ilmu medis, hukum, dan pendidikan khusus saja. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan belum berkontribusi secara optimal dalam mewujudkan *civic equity* dan pemberdayaan disabilitas berbasis *civic action* pemuda di kalangan masyarakat.

Penyandang disabilitas di Indonesia semakin bertambah dari tahun ke tahun. Jumlah penyandang disabilitas berdasarkan data Kementerian Sosial pada tahun 2010 sebanyak 11,58 juta penduduk, semakin meningkat pada tahun 2021 menjadi 22,97 penduduk. Realita ini harus didukung oleh sikap inklusif warga negara melalui *civic action* untuk pemberdayaan disabilitas berbasis *citizenship education*. Ableisme menjadi penyebab utama marginalisasi penyandang disabilitas. Kondisi ini menuntut adanya jaminan keterlibatan warga negara untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas yang sering diabaikan pemerintah, sebagaimana terjadi di Kamboja (Zook, 2010; Charitsis & Lehtiniemi, 2023). Substansi pendidikan kewarganegaraan sosio-kultural berfokus pada urgensi pemberdayaan penyandang disabilitas melalui jaminan konstitusi. Pendidikan kewarganegaraan diharapkan mampu menyelesaikan krisis kemanusiaan secara global, disinformasi media, serta marginalisasi sosial melalui habituasi karakter demokratis yang inklusif (Miles, 2021). Penyandang disabilitas harus diberdayakan, baik dari segi ekonomi maupun sosial, agar mampu menjalani kehidupan sehari-hari secara mandiri.

Hak bagi penyandang disabilitas telah dijamin dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 94 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menegaskan pentingnya upaya peningkatan kompetensi dan motivasi hidup, transformasi nilai inklusif, penguatan potensi dan sumber daya, bantuan keuangan dan pelatihan bisnis, serta perlindungan akses bagi penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas adalah minoritas terbesar di Amerika Serikat yang terus menerima diskriminasi terutama di bidang pendidikan. *American Disability Act* dan *Individuals with Disabilities Education Act* belum dilaksanakan secara optimal karena tidak memuat *civic engagement* lintas sektor (Rivera &

Tilcsik, 2023). Pendidikan kewarganegaraan di Britania Raya telah menerapkan model *service learning* dalam membina peserta didik sebagai *active citizenship* untuk membentuk kepekaan sosial dan sikap kepemimpinan pemuda (Jerome, 2012). Pendidikan kewarganegaraan sosio-kultural diharapkan mampu memfasilitasi *civic action* pemuda untuk *civic empowerment* disabilitas.

Pemberdayaan penyandang disabilitas tidak dapat dilakukan hanya dengan mengandalkan pendekatan hukum yang bersifat *top down*. Upaya tersebut perlu didukung dengan keterlibatan warga negara yang inklusif agar lebih berdampak nyata bagi kesetaraan disabilitas berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Akomodasi yang disampaikan melalui *American Disability Act* pada tahun 1990 terbukti belum dilaksanakan secara optimal karena penyandang disabilitas tetap terisolasi dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik di Amerika Serikat. Kondisi ini diperburuk oleh sikap masyarakat yang eksklusif sehingga penyandang disabilitas masih terabaikan sebagai warga negara (Trevisan, 2020). Pemberdayaan disabilitas di Amerika Serikat dilakukan dengan mengoptimalkan peran pendidikan kewarganegaraan yang bersifat holistik sebagai upaya memperkuat literasi agar terbentuk kesadaran peserta didik untuk tidak bersikap diskriminatif. Pendidikan kewarganegaraan menjadi salah satu sarana pembelajaran inklusif yang mendukung pemberdayaan terhadap kelompok rentan (Bueso, 2022). Visi *civic equity* disabilitas di lembaga pendidikan dapat diwujudkan melalui pendidikan kewarganegaraan yang dapat menumbuhkan literasi keadilan sekaligus mengoptimalkan potensi penyandang disabilitas.

Pendidikan kewarganegaraan sosio-kultural dapat meminimalisir stigma ableisme karena memuat *civic action* pemuda untuk memberdayakan disabilitas. Ableisme timbul karena adanya *medical or individual model of disability* serta *charity model of disability*. *Medical or individual model of disability* merupakan teori dalam kajian medis yang menegaskan bahwa penyandang disabilitas dianggap tidak kompeten, tidak normal, bahkan menjadi aib bagi keluarga, sedangkan *charity model of disability* memandang penyandang disabilitas sebagai pihak yang perlu dikasihani atau hanya layak menerima bantuan amal (Retief & Letsosa, 2018; Bunbury, 2019). Pendidikan kewarganegaraan sosio-kultural memuat *social*

model of disability sebagai kajian pada ilmu sosial yang bersifat objektif, inklusif, dan proporsional. Aksi terpadu untuk mengatasi kesenjangan pemberdayaan minoritas dapat dilakukan melalui pendidikan kewarganegaraan, karena memuat pola pelibatan lintas sektor yang berkesinambungan serta menjamin kesetaraan dan kesempatan yang sama dalam mengoptimalkan potensi penyandang disabilitas (Addington, 2016). Konsep pendidikan kewarganegaraan di negara maju, misalnya Inggris, tidak hanya bersifat teoritis tetapi cenderung mengarah pada upaya secara praktis untuk mengatasi berbagai persoalan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

Model *civic action* pemuda untuk memberdayakan disabilitas berbasis *citizenship education* perlu dikaji lebih lanjut. Oleh karena itu, kajian ini membahas tentang praktik *civic action* pemuda dalam mengatasi *individual or medical model of disability* dan *charity model of disability* sebagai faktor penyebab munculnya stigma ableisme serta model *civic action* pemuda yang dapat dikembangkan untuk memberdayakan disabilitas. Kajian ini diharapkan dapat memperkuat integrasi kajian disabilitas dalam pendidikan kewarganegaraan, khususnya melalui pelibatan warga negara muda dalam proses pemberdayaan penyandang disabilitas.

METODE

Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk mengkaji konsep *civic action* pemuda dalam pemberdayaan penyandang disabilitas. Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih karena mampu menghasilkan data lapangan yang bersifat natural sehingga memungkinkan analisis secara mendalam (Subandi, 2011). Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara secara mendalam dengan pemuda, penyandang disabilitas, pendidik, dan penggiat komunitas yang relevan. Observasi partisipatif dilakukan di lingkungan sosial dan pendidikan. Data sekunder diperoleh dari dokumen kebijakan, laporan penelitian, serta literatur akademik terkait isu disabilitas dan pendidikan kewarganegaraan. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles, Huberman, & Saldana, 2014). Kajian ini bertujuan untuk merumuskan model *citizenship education* yang berorientasi

pada pembentukan komunitas kewarganegaraan inklusif berbasis *civic action* pemuda sebagai paradigma baru pendidikan kewarganegaraan dalam mengatasi praktik ableisme.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Civic Action Pemuda dalam Mengatasi *Charity Model of Disability* dan *Medical or Individual Model of Disability*

Pemberdayaan masyarakat seharusnya dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan dengan berlandaskan pada potensi, minat, serta kompetensi setiap individu. Hal ini bertujuan untuk mendorong kemandirian, meningkatkan partisipasi dalam pembangunan sosial, serta menjadi bukti kedewasaan dalam kehidupan sosial dan politik (Higgins, 1999). Pemberdayaan disabilitas berkontribusi pada peningkatan kompetensi kewarganegaraan (*civic competence*) secara berkelanjutan. Esensi *civic competence* mencakup keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), sikap kewarganegaraan (*civic disposition*), dan pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) sebagai wujud holistik warga negara yang cerdas dan berkarakter baik (Branson, 1999). *Civic action* pemuda dalam memberdayakan penyandang disabilitas berfokus pada praktik pendidikan kewarganegaraan nonformal karena bersifat nyata di lingkungan sosial serta berlandaskan pada prinsip keadilan sosial sesuai dengan Pancasila.

Civic action pemuda dalam memberdayakan penyandang disabilitas memiliki peran penting untuk mengatasi praktik ableisme. Pemberdayaan disabilitas mencakup proses transfer pengetahuan, pemahaman, sikap inklusif, kompetensi, serta sumber daya yang bermanfaat bagi penyandang disabilitas maupun pemuda agar masing-masing dapat berdaya dan berkompeten. *Civic action* pemuda melalui pendidikan kewarganegaraan harus dilaksanakan secara inklusif, kreatif, dan berkelanjutan. Upaya tersebut tidak terbatas pada pemberian dana yang justru dapat menimbulkan pelecehan sosial serta memperkuat *charity model of disability*, tetapi harus berorientasi pada penguatan potensi dan kapasitas penyandang disabilitas.

Civic action pemuda menjadi wahana strategis dalam menyelesaikan *medical or individual model of disability*. *Civic action* pemuda menentang *charity model of disability*

sebagai teori yang memandang lemah penyandang disabilitas. *Civic action* pemuda berbasis pendidikan kewarganegaraan berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya terkait isu disabilitas. Pendekatan ini menempatkan disabilitas bukan semata sebagai persoalan sosial tetapi juga sebagai isu kewarganegaraan, serta mengakui penyandang disabilitas sebagai individu yang dapat berkembang melalui penguatan kompetensi. *Civic action* pemuda dalam memberdayakan disabilitas mampu memberikan dampak positif diantaranya penguatan karakter humanis dan inklusif, peningkatan keterlibatan penyandang disabilitas, serta perluasan wawasan mengenai disabilitas (Kuang & Kennedy, 2021). Pendidikan kewarganegaraan berbasis filantropi (*civic philanthropy*) dimaksudkan untuk menjamin pemenuhan hak politik penyandang disabilitas. Optimalisasi pendidikan kewarganegaraan dalam pemberdayaan disabilitas bersifat integratif karena menumbuhkan kepekaan sosial serta memperkuat tanggung jawab pemuda dalam mewujudkan kesetaraan bagi penyandang disabilitas.

Pendidikan kewarganegaraan nonformal dalam kurikulum Indonesia dinilai belum mengakomodasi pemberdayaan disabilitas melalui *civic action* pemuda. Hal ini perlu memperoleh perhatian khusus karena pendidikan kewarganegaraan nonformal seharusnya memuat upaya penyelesaian masalah sosial yang bersifat kompleks. Pendidikan kewarganegaraan nonformal seharusnya bersifat akomodatif terhadap penyandang disabilitas. Negara Australia telah merealisasikan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas melalui konstitusi yang inklusif dan didukung partisipasi masyarakat dalam pemenuhan hak pendidikan yang bersifat holistik (Pitman & Brett, 2022). Optimalisasi pendidikan kewarganegaraan di masyarakat bersifat praktis sangat diperlukan untuk melengkapi kelemahan pendidikan kewarganegaraan yang tekstual di Australia, Kanada, serta Inggris (Davies & Issitt, 2005). Disabilitas dapat berdaya apabila memperoleh pembinaan, perlindungan, dan kesempatan secara berkelanjutan.

Pendidikan kewarganegaraan nonformal harus dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk memberdayakan penyandang disabilitas melalui *civic action* pemuda. Upaya ini menjadi landasan ilmiah dalam mewujudkan komunitas

kewarganegaraan yang akomodatif. Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia yang berlandaskan Pancasila semakin menegaskan urgensi *civic action* pemuda untuk memberdayakan disabilitas. Pemberdayaan akan lebih transformatif apabila didukung fasilitas publik yang inklusif, kesadaran sosial, kebijakan pemerintah yang akomodatif, serta keterlibatan komunitas nirlaba (Dispenza, 2021). *Civic empowerment* menjadi bukti kepedulian masyarakat terhadap kompetensi dan keadilan bagi penyandang disabilitas. Pemberdayaan disabilitas merupakan upaya nyata untuk menentang ableisme sebagai stigma yang timbul dari *charity model of disability* maupun *medical or individual model of disability*. Pemberdayaan yang disertai *civic action* pemuda dapat mewujudkan komunitas kewarganegaraan yang akomodatif.

Pemberdayaan disabilitas bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, kreativitas, dan kemandirian berbasis kompetensi. Proses ini perlu disertai dengan keterlibatan masyarakat, kebijakan inklusif, motivasi penyandang disabilitas, dan inovasi sosial (Kunnath dkk., 2023). Pemberdayaan tidak hanya mengarah pada upaya untuk memberikan sumbangan finansial, tetapi lebih menekankan pada pengembangan kecerdasan, karakter, kompetensi, dan sumber daya. *Civic action* pemuda dalam bentuk kolektif memuat *civic responsibility* dan *civic virtue* yang penting untuk mewujudkan kesetaraan penyandang disabilitas sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Konsep masyarakat inklusif hanya dapat terwujud dengan dukungan keluarga, pendidikan inklusif, komunitas masyarakat, kebijakan pemerintah yang berorientasi aksi, serta *civil society* yang konsisten (Boland & Guerin, 2023). Optimalisasi pendidikan kewarganegaraan nonformal dalam pemberdayaan disabilitas menjadikan isu diskriminasi disabilitas sebagai persoalan kewarganegaraan bersama yang harus diatasi melalui *civic action* pemuda.

Model Civic Action Pemuda untuk Pemberdayaan Disabilitas Berbasis Citizenship Education

Pemberdayaan disabilitas tidak hanya terfokus pada pelatihan keterampilan saja, tetapi juga mencakup penguatan kapasitas politik agar penyandang disabilitas mampu berperan aktif sebagai pelaku politik. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan pemuda sebagai transformator untuk pemenuhan hak-hak politik penyandang disabilitas. Upaya untuk menjamin hak politik

penyandang disabilitas dapat dilakukan melalui edukasi politik, penyuluhan tentang pemilihan umum, penyediaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ramah disabilitas, serta adanya layanan *door to door* untuk mempermudah penyandang disabilitas dalam penyaluran hak pilih. Pendidikan kewarganegaraan berfungsi sebagai sarana pembelajaran politik bagi penyandang disabilitas.

Pemenuhan hak politik penyandang disabilitas hingga kini masih terfokus pada ranah pemilihan umum dan penyaluran aspirasi, belum sepenuhnya diarahkan pada upaya pemberdayaan politik secara menyeluruh. Pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas belum berjalan secara optimal, baik dalam konteks pemilihan umum maupun dalam penyaluran aspirasi politik (Nurbeti & Chandra, 2021). Penyandang disabilitas yang telah lanjut usia cenderung terisolasi dan memiliki keterbatasan dalam pengetahuan politik, sebaliknya penyandang disabilitas yang masih muda menunjukkan motivasi lebih besar untuk terlibat aktif dalam kegiatan politik (Schur dkk., 2002). Penyandang disabilitas memiliki kemungkinan dua puluh kali lebih rendah untuk berdaya dibandingkan masyarakat umum akibat adanya dominasi sosial maupun politik. *Civic action* pemuda menjadi ruang strategis untuk meningkatkan literasi politik penyandang disabilitas serta menumbuhkan *civic virtue* di kalangan pemuda (Mulia, Yuliandari, & Hartanto, 2024). *Civic action* pemuda berperan penting dalam mengupayakan pemenuhan hak politik sekaligus memperkuat pemberdayaan politik penyandang disabilitas.

Civic action pemuda berbasis *citizenship education* diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif untuk mendorong pemberdayaan bagi penyandang disabilitas. Bentuk *civic action* pemuda dalam memberdayakan disabilitas dapat diwujudkan melalui organisasi maupun komunitas atau kegiatan insidental kolektif. Pendidikan kewarganegaraan modern berperan penting dalam menjamin hak politik disabilitas. Hal ini sangat diperlukan karena terjadi ketimpangan capaian kewarganegaraan antara kelompok nondisabilitas dengan penyandang disabilitas yang dipengaruhi oleh hambatan emosional serta kurangnya akses pembelajaran inklusif (Setiyaningsih & Yuliani, 2022). Rendahnya tingkat partisipasi disabilitas dalam komunitas masyarakat menunjukkan perlunya pendidikan

kewarganegaraan yang lebih inklusif (Garwood dkk., 2021). Pendidikan kewarganegaraan dengan mengedepankan *civic equity* berperan dalam menjamin pemberdayaan politik bagi penyandang disabilitas agar tidak sekadar diposisikan sebagai objek politik melainkan sebagai warga negara yang memiliki kapasitas politik secara utuh.

Civic action pemuda berbasis *citizenship education* berpedoman pada prinsip *social model of disability* yang memandang bahwa penyandang disabilitas mampu berdaya apabila didukung dengan faktor-faktor yang bersifat inklusif. *Civic action* pemuda dalam mendukung penyandang disabilitas bukan hanya sebatas sikap inklusif, tetapi juga mencakup tindakan nyata dalam mengatasi ableisme dengan pemberdayaan yang menekankan pada penguasaan kompetensi dan keterampilan (Eidhof & de Ruyter, 2022). Strategi dan upaya pemberdayaan disabilitas seharusnya didasarkan pada kompetensi, misalnya mengadakan pelatihan sensorik, pelatihan orientasi medan, serta pelibatan masyarakat dengan dukungan teknologi digital (Gomes & Eusebio, 2023). Pemberdayaan disabilitas harus dilakukan secara langsung di tengah masyarakat dengan melatih keterampilan berkomunikasi, beradaptasi, serta membangun motivasi agar dapat mengurangi kesan keterasingan sosial.

Esensi *civic action* pemuda dalam pemberdayaan disabilitas yaitu memperkuat keterampilan seperti daya juang, komunikasi, pemikiran kritis, inovasi, kreativitas, kolaborasi, *decision making*, kepekaan sosial, sikap kepemimpinan, serta manajemen konflik. *Citizenship education* dapat mewujudkan emansipasi warga negara sekaligus memperkuat *civic competence* sebagaimana diterapkan di Catalonia, Columbia, Inggris, dan Pakistan (Sant dkk., 2022). Peserta didik yang memperoleh pembelajaran *citizenship education* di Inggris menunjukkan kesadaran lebih tinggi akan *civic engagement*, sehingga lebih berdaya dalam memperjuangkan hak masyarakat (Pontes, Henn, & Griffiths, 2019). Aksi pemberdayaan disabilitas perlu diarahkan pada peningkatan keterampilan dengan melibatkan masyarakat, seperti praktik di Norwegia yang melibatkan orang lain sebagai tutor sebaya untuk mendukung kompetensi disabilitas (Rustad & Kassah, 2020; Ben-Porath, 2007). *Civic action* pemuda dijadikan sebagai dasar dalam menumbuhkan sikap demokratis

dan patriotisme, karena mengedepankan kebajikan yang kemudian diinternalisasikan melalui *citizenship education*.

Model *civic action* pemuda dalam memberdayakan penyandang disabilitas berbasis *citizenship education* dapat dijadikan rujukan ilmiah sekaligus praktik sosial, baik pada tingkat nasional maupun lintas sektor. Model ini menegaskan bahwa pemberdayaan disabilitas tidak hanya menjadi tanggung jawab negara tetapi juga melibatkan peran aktif masyarakat, khususnya generasi muda. Upaya tersebut mendukung terwujudnya pemberdayaan yang berkelanjutan, inklusif, serta selaras dengan prinsip demokrasi dan keadilan sosial. Pendidikan kewarganegaraan memiliki posisi penting untuk menempatkan isu disabilitas dalam lingkup lokal, nasional, hingga global dengan menekankan penguatan wawasan, sikap humanis, dan keterampilan sosial generasi muda (Deimel dkk., 2022). *Civic action* pemuda dalam mendukung disabilitas dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu organisasi formal, relawan komunitas, serta inisiatif insidental yang bersifat kolektif.

Organisasi formal merupakan salah satu sarana strategis dalam mewujudkan *civic action* pemuda karena menyediakan struktur, regulasi, dan program yang terarah untuk mendukung pemberdayaan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Aksi pemuda dalam memenuhi hak-hak politik dan memberdayakan disabilitas secara politik diwujudkan melalui tim *Ad Hoc* Komisi Pemilihan Umum diantaranya Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih). Contoh lainnya yaitu kegiatan yang dilakukan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa Peduli Difabel. Organisasi ini menjadi sarana bagi mahasiswa Universitas Gadjah Mada untuk melindungi hak-hak pendidikan sekaligus memberdayakan mahasiswa penyandang disabilitas secara berkesinambungan. Partisipasi politik di negara-negara Barat tidak dibatasi oleh aspek gender, status sosial, maupun pendidikan, melainkan lebih diarahkan pada kesadaran dan kepedulian terhadap isu pemberdayaan sosial (Bonnesen, 2018). Keterlibatan pemuda melalui organisasi formal mencerminkan bentuk partisipasi politik generasi muda abad-21.

Relawan dalam komunitas tertentu diharapkan mampu memberikan arahan kepada

masyarakat untuk meminimalisir terjadinya tindak diskriminasi bagi penyandang disabilitas. Hal ini terlihat dari upaya mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta dalam memberdayakan dan mendampingi mahasiswa disabilitas yang diwujudkan melalui kegiatan relawan mahasiswa disabilitas di bawah binaan Unit Layanan Disabilitas. Lembaga ini dibentuk untuk memperkuat keterampilan mahasiswa dalam upaya pemecahan masalah sekaligus menumbuhkan *civic responsibility* mahasiswa. Orientasi tersebut menegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, melainkan pada dimensi praktis yang berkaitan dengan realitas sosial.

Kegiatan insidental diharapkan dapat menciptakan kesejahteraan, menumbuhkan karakter kepemimpinan, memperkuat keterlibatan, serta meningkatkan kemandirian penyandang disabilitas. Tim mahasiswa pendidikan kewarganegaraan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia, melalui pembelajaran kewirausahaan, telah berinisiatif melaksanakan pengabdian bersama dengan komunitas Planet Kreatif Disabilitas. Bentuk kegiatan yang dilakukan antara lain *sharing session* serta pelatihan keterampilan mengolah bambu menjadi tumbler, gantungan kunci, dan hiasan rumah yang memiliki nilai ekonomi. Kegiatan ini bersifat insidental, nirlaba, serta menekankan kreativitas kolektif. Kegiatan insidental semacam ini turut berkontribusi dalam upaya meningkatkan empati, keterampilan sosial, serta semangat kewirausahaan mahasiswa disabilitas (Zahedi dkk., 2023). Pendidikan kewarganegaraan pada era modern seperti sekarang ini harus dipadukan dengan pendekatan *service learning* untuk mengatasi persoalan sosial yang cukup kompleks.

Model *civic action* pemuda yang telah dipaparkan menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan nonformal berpotensi memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan keadilan bagi penyandang disabilitas. *Civic action* pemuda yang bersifat sukarela, berkualitas, dan berkesinambungan menjadi pondasi penting untuk menciptakan komunitas kewargaan yang inklusif. Pendidikan kewarganegaraan berlandaskan Pancasila memperkuat arah pemberdayaan karena menegaskan bahwa nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan persatuan bangsa harus diwujudkan dalam praktik nyata.

Pemberdayaan disabilitas melalui *civic action* pemuda tidak hanya menambah bukti akademis, tetapi juga membuka ruang transformasi sosial menuju masyarakat yang lebih adil, setara, dan berdaya.

Pendidikan kewarganegaraan harus mampu menjamin adanya *civic action* pemuda dalam pemberdayaan penyandang disabilitas agar stigma ableisme dapat diatasi secara komprehensif. *Civic action* di luar sekolah atau di lingkungan sosial merupakan bentuk *culture learning* yang bersifat transformatif karena mampu memperkuat kompetensi kewargaan peserta didik sekaligus menyelesaikan masalah sosial yang dinamis (LeCompte, Blevins, & Riggers-Piehl, 2020). Pendidikan kewarganegaraan nonformal perlu memuat *civic action* dalam pemberdayaan disabilitas, mengingat penyandang disabilitas merupakan bagian dari warga negara Indonesia yang hak-haknya harus dijamin. Upaya ini menjadikan pendidikan kewarganegaraan semakin holistik dan inklusif karena mencakup kajian tentang disabilitas. Konsep *civic education* yang transformatif menuntut adanya analisis isu sosial seperti demokrasi, pelanggaran hak asasi manusia, polarisasi politik, dan perubahan iklim (Hoggan-Kloubert dkk., 2023). Konstruksi *civic action* pemuda untuk pemberdayaan penyandang disabilitas menjadi modal sosial dalam mewujudkan komunitas yang akomodatif, sekaligus memandatkan pendidikan kewarganegaraan sebagai alternatif baru untuk mengatasi kompleksitas isolasi penyandang disabilitas.

Pendidikan kewarganegaraan menjadikan *social model of disability* lebih aplikatif di masyarakat dengan mendorong pemberdayaan disabilitas yang melibatkan pemuda untuk mewujudkan *civic equity* berlandaskan Pancasila serta memperkuat *civic competence* generasi muda. *Citizenship education* memuat visi penguatan *civic competence* yang bersifat inklusif agar warga negara dapat berpartisipasi dalam urusan publik, menegakkan keadilan, serta meningkatkan kualitas demokrasi (Joris, Simons, & Agirdag, 2022; Arthur & Davison, 2000). *Civic engagement* pemuda, masyarakat, dan lintas sektor sangat penting untuk mewujudkan *community civic* yang memberdayakan disabilitas (Nanggala dkk., 2024). *Civic action* pemuda dalam mendukung penyandang disabilitas merupakan bentuk nyata partisipasi yang berupaya melampaui

keterbatasan paradigma *individual or medical model of disability* maupun *charity model of disability*.

SIMPULAN

Civic action pemuda menentang paradigma *charity model of disability* dan *medical or individual model of disability* karena berpedoman pada prinsip *social model of disability* yang memandang bahwa penyandang disabilitas mampu berdaya apabila didukung dengan faktor-faktor yang bersifat inklusif. Model *civic action* pemuda untuk memberdayakan penyandang disabilitas dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu dengan terlibat dalam organisasi formal, menjadi relawan komunitas, serta inisiatif insidental yang bersifat kolektif. Organisasi formal yang dimaksud yaitu unit kegiatan mahasiswa peduli difabel di tingkat kampus serta instansi pemerintah seperti Komisi Pemilihan Umum yang berwenang dalam menjamin hak politik penyandang disabilitas. Relawan dalam komunitas tertentu seperti unit layanan disabilitas diharapkan dapat menjadi alternatif solusi untuk meminimalisir stigma ableisme di lingkungan masyarakat. Kegiatan insidental dapat diwujudkan melalui pengabdian kepada masyarakat yang mengutamakan *sharing session* sebagai upaya menciptakan kesejahteraan, menumbuhkan karakter kepemimpinan, memperkuat keterlibatan, serta meningkatkan kemandirian penyandang disabilitas.

DAFTAR RUJUKAN

- Addington, L. A. (2016). Using Constitutional Law Classes to Address the “Civic Empowerment Gap” Among Inner-City Public High School Students. *Education And Urban Society*, 48(9), 807-826. <https://doi.org/10.1177/0013124516630597>
- Arthur, J., & Davison, J. (2000). Social Literacy and Citizenship Education in the School Curriculum. *The Curriculum Journal*, 11(1), 9-23. <https://doi.org/10.1080/095851700361366>
- Ben-Porath, S. (2007). Civic Virtue Out of Necessity: Patriotism and Democratic Education. *Theory and Research in Education*, 5(1), 41-59. <https://doi.org/10.1177/1477878507073608>
- Boland, G., & Guerin, S. (2023). Supporting Social Inclusion in Neighbourhoods of

- Adults with Intellectual Disabilities: Service Providers' Practice Experiences. *Journal of Intellectual Disabilities*, 27(2), 291-314. <https://doi.org/10.1177/17446295221085479>
- Bonnesen, L. (2018). Social Inequalities in Youth Volunteerism: A Life-Track Perspective on Danish Youths. *Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations*, 29(1), 160-173. <https://www.jstor.org/stable/45105401>
- Branson, S. M. (1999). *Belajar Civic Education dari Amerika*. Yogyakarta: Ikis.
- Bueso, L. (2022). Civic Equity for Students with Disabilities. *Teachers College Record*, 124(1), 62-86. <https://doi.org/10.1177/01614681221086092>
- Bunbury, S. (2019). Unconscious Bias and the Medical Model: How the Social Model May Hold the Key to Transformative Thinking About Disability Discrimination. *International Journal of Discrimination and the Law*, 19(1), 26-47. <https://doi.org/10.1177/1358229118820742>
- Charitsis, V., & Lehtiniemi, T. (2023). Data Ableism: Ability Expectations and Marginalization in Automated Societies. *Television & New Media*, 24(1), 3-18. <https://doi.org/10.1177/15274764221077660>
- Davies, I., & Issitt, J. (2005). Reflections on Citizenship Education in Australia, Canada and England. *Comparative Education*, 41(4), 389-410. <https://doi.org/10.1080/03050060500300915>
- Deimel, D., Hahn-Laudenberg, K., Ziemes, J. F., & Abs, H. J. (2024). Civic Education and Social Interactions at School as Drivers of Intended Electoral Participation: Similarities and Differences in Four European School Systems. *Education, Citizenship and Social Justice*, 19(1), 37-57. <https://doi.org/10.1177/17461979221114549>
- Dispenza, F. (2021). Empowering the Career Development of Persons with Disabilities (PWD). *Journal of Career Development*, 48(5), 670-685. <https://doi.org/10.1177/0894845319884636>
- Eidhof, B., & de Ruyter, D. (2022). Citizenship, Self-Efficacy and Education: A Conceptual Review. *Theory and Research in Education*, 20(1), 64-82. <https://doi.org/10.1177/14778785221093313>
- Garwood, J. D., Ciullo, S., Wissinger, D. R., & McKenna, J. W. (2021). Civics Education for Students with Learning Disabilities and Emotional and Behavioral Disorders. *Intervention in School and Clinic*, 56(4), 250-254. <https://doi.org/10.1177/1053451220944143>
- Gomes, A., & Eusebio, C. (2023). Empowering People with Visual Disabilities Through Rural Tourism: The Benefits of Nature Activities and How the Various Travel Constraints Can Be Overcome. *Tourism Recreation Research*, 48(6), 940-954. <https://doi.org/10.1080/02508281.2023.2221071>
- Higgins, J. W. (1999). Citizenship and Empowerment: A Remedy for Citizen Participation in Health Reform. *Community Development Journal*, 34(4), 287-307. <https://doi.org/10.1177/2043610618814846>
- Hoggan-Kloubert, T., Brandi, U., Hodge, S., Knight, E., & Milana, M. (2023). Civic Lifelong Education: Fostering Informed Citizenship Amidst Global Challenges and Democratic Transformations. *International Journal of Lifelong Education*, 42(4), 335-341. <https://doi.org/10.1080/02601370.2023.2234133>
- Jerome, L. (2012). Service learning and Active Citizenship Education in England. *Education, Citizenship and Social Justice*, 7(1), 59-70. <https://doi.org/10.1177/1746197911432594>
- Joris, M., Simons, M., & Agirdag, O. (2022). Citizenship-as-Competence, What Else? Why European Citizenship Education Policy Threatens to Fall Short of its Aims. *European Educational Research Journal*, 21(3), 484-503. <https://doi.org/10.1177/1474904121989470>
- Kuang, X., & Kennedy, K. J. (2021). Alienated and Disaffected Students: Exploring the Civic Capacity of 'Outsiders' in Latin America. *Education, Citizenship and Social Justice*, 16(1), 49-61. <https://doi.org/10.1177/1746197919886877>
- Kunnath, S. K., George, V. M., Kumar, K. G. S., & Babu, A. (2023). Disability Empowerment in Kerala: A Status Analysis and Vision for the Future. *Journal of Developing Societies*, 39(1), 104-127. <https://doi.org/10.1177/0169796X221150482>
- LeCompte, K., Blevins, B., & Riggers-Piehl, T.

- (2020). Developing Civic Competence Through Action Civics: A Longitudinal Look at the Data. *The Journal of Social Studies Research*, 44(1), 127-137. <https://doi.org/10.1016/j.jssr.2019.03.002>
- Miles, J. (2021). The Ongoing Crisis and Promise of Civic Education. *Curriculum Inquiry*, 51(4), 381-388. <https://doi.org/10.1080/03626784.2021.1953294>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications.
- Mulia, I. B., Yuliandari, E., & Hartanto, R. V. P. (2024). Civic Engagement Penyandang Disabilitas dalam Memperjuangkan Hak Atas Pekerjaan: Studi pada Induk Disabilitas Purworejo. *Academy of Education Journal*, 15(1), 925-938.
- Nanggala, A., Suryadi, K., Darmawan, C., Saepudin, E., & Darmawan, D. (2024). Bridging Gaps: Enhancing Civic Engagement in Citizenship Education for Community Civic which Empowerment Individuals with Disabilities. *Evolutionary Studies In Imaginative Culture*, 8(2), 1851-1870. <https://doi.org/10.70082/esiculture.vi.1680>
- Nurbeti., & Chandra, H. S. (2021). Pemenuhan Hak Pilih bagi Disabilitas dalam Pemilu oleh KPU di Sumatera Barat. *Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, 15(2), 130-137. <https://doi.org/10.22225/kw.15.2.2021.130-137>
- Pitman, T., & Brett, M. (2022). Disability and Australian Higher Education: The Case for an Accessible Model of Disability Support. *Australian Journal of Education*, 66(3), 314-325. <https://doi.org/10.1177/00049441221120713>
- Pontes, A. I., Henn, M., & Griffiths, M. D. (2019). Youth Political (Dis)Engagement and the Need for Citizenship Education: Encouraging Young People's Civic and Political Participation Through the Curriculum. *Education, Citizenship and Social Justice*, 14(1), 3-21. <https://doi.org/10.1177/1746197917734542>
- Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871.
- Retief, M., & Letsosa, R. (2018). Models of Disability: A Brief Overview. *HTS Teologiese Studies*, 74(1), 1-8. <https://doi.org/10.4102/hts.v74i1.4738>
- Rivera, L. A., & Tilcsik, A. (2023). Not in My Schoolyard: Disability Discrimination in Educational Access. *American Sociological Review*, 88(2), 284-321. <https://doi.org/10.1177/00031224221150433>
- Rustad, M., & Kassah, K. A. (2020). Learning Disability and Work Inclusion: On the Experiences, Aspirations and Empowerment of Sheltered Employment Workers in Norway. *Disability & Society*, 36(3), 399-419. <https://doi.org/10.1080/09687599.2020.1749564>
- Sant, E., Gonzalez-Valencia, G., Shaikh, G., Santisteban, A., da Costa, M., Hanley, C., & Davies, I. (2022). Characterising Citizenship Education in Terms of its Emancipatory Potential: Reflections from Catalonia, Colombia, England, and Pakistan. *Compare: A Journal of Comparative and International Education*, 54(4), 608-627. <https://doi.org/10.1080/03057925.2022.2110840>
- Schur, L., Shields, T., Kruse, D., & Schriener, K. (2002). Enabling Democracy: Disability and Voter Turnout. *Political Research Quarterly*, 55(1), 167-190. <https://doi.org/10.1177/106591290205500107>
- Setiyaningsih, K., & Yuliani, S. (2022). Community Governance dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas: Studi pada Komunitas Difabel Blora Mustika (DBM). *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, 2(2), 332-346.
- Subandi. (2011). Deskripsi Kualitatif sebagai Satu Metode dalam Penelitian Pertunjukan. *Harmonia*, 11(2), 173-179. <https://doi.org/10.15294/harmonia.v11i2.2210>
- Trevisan, F. (2020). "Do You Want to Be a Well-Informed Citizen, or Do You Want to Be Sane?" Social Media, Disability, Mental Health, and Political Marginality. *Social Media + Society*, 6(1), 1-11. <https://doi.org/10.1177/2056305120913909>
- Yusainy, C. A., Thohari, S., & Gustomy, R. (2016). StopAbleism: Reduksi Stigma kepada Penyandang Disabilitas melalui

- Intervensi Bias Implisit. *Jurnal Psikologi*, 43(1), 1-15. <https://doi.org/10.22146/jpsi.9168>
- Zahedi, S., Jaffer, R., Bryant, C. L., & Bada, K. (2023). Service-Learning Effects on Student Civic Engagement and Community: A Case Study from India. *Education, Citizenship and Social Justice*, 18(1), 3-21. <https://doi.org/10.1177/17461979211041334>
- Zook, D. C. (2010). Disability and Democracy in Cambodia: An Integrative Approach to Community Building and Civic Engagement. *Disability & Society*, 25(2), 149-161. <https://doi.org/10.1080/09687590903534304>